

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPBD KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026



Jl. Letjend. Sutoyo No.71 Kota Pontianak



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ijin-Nyalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak Periode 2024 – 2026 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. RENSTRA ini memuat tujuan, sasaran-sasaran strategis serta kebijakan-kebijakan yang akan diwujudkan dan dituangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan peran serta seluruh lapisan masyarakat serta sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya program dan kegiatan yang disusun dalam RENSTRA ini, dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan hambatan/kendala yang akan timbul/terjadi.

Dengan telah disusunnya RENSTRA ini, semoga dapat menjadi pedoman bagi segenap ASN di jajaran BPBD Kota Pontianak dalam rangka menunjang serta mendukung efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga diharapkan RENSTRA ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak secara efektif dan efisien.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya .....	II-2
2.3 Kinerja Pelayanan .....	II-5
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-37
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan.....	III-1
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-2
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
4.2 Cascading.....	IV-3
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. ..</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra BPBD Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di BPBD Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra BPBD Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024-2026.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 120).
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan BPBD berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, dan selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun terkait kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 120 tahun 2021. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Walikota tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas BPBD Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

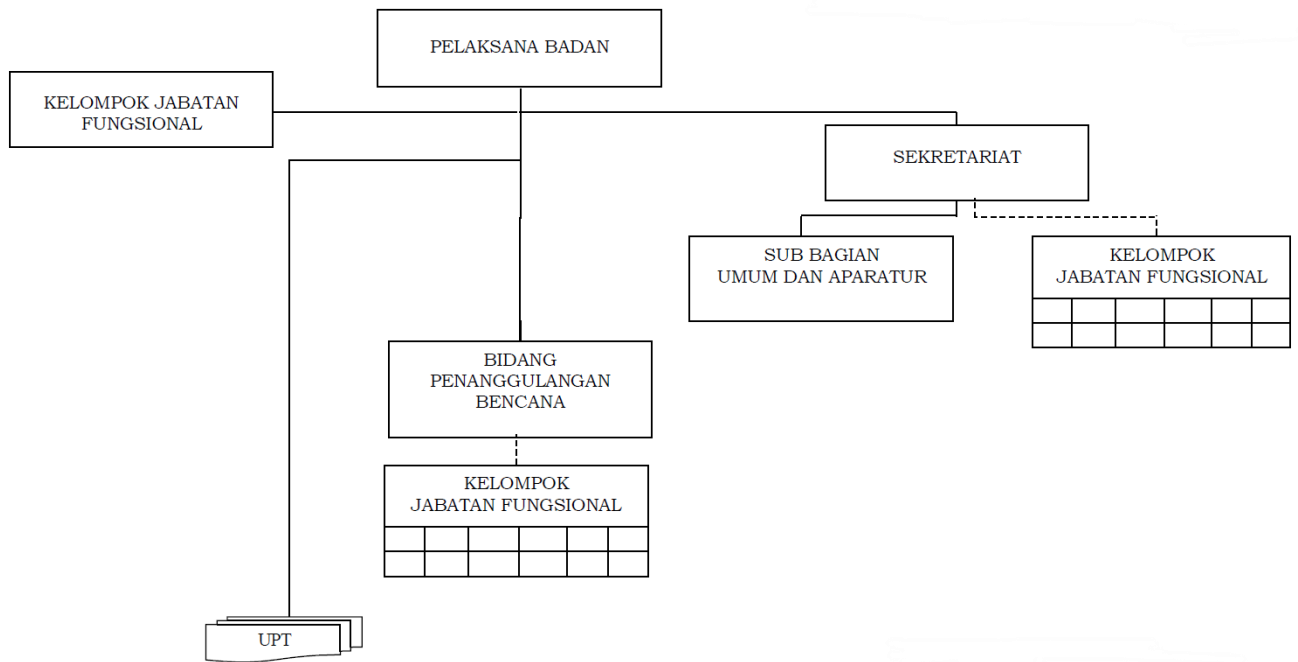
- a. Perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sementara Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Kepala Sekretariat;
  - i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA PONTIANAK**



**2.2. Sumber Daya**

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BPBD Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya berupa sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Sebagai Perangkat Daerah yang masih sangat muda, BPBD Kota Pontianak masih memerlukan Personil Kepegawaian serta perlengkapan sarana dan prasarana secara cukup dan memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Adapun kondisi SDM yang tersedia saat ini yaitu:

**A. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Adapun keadaan jumlah personil / pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak hingga saat ini berjumlah 16 orang terdiri dari:

- Golongan IV = 2 orang
- Golongan III = 12 orang
- Golongan II = 2 orang

a. Spesifikasi PNS berdasarkan Jabatan (Eselonering) :

No.	Jabatan (Eselonering)	Jumlah
1.	Eselon IIa	1 orang
2.	Eselon IIIa	1 orang
3.	Eselon IIIb	-
4.	Eselon Iva	1 orang
5.	Jabatan Fungsional Terentu	3 orang
5.	Staf (Non Eselon)	10 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>16 orang</b>

b. Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang dan Tingkat Pendidikan:

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah PNS						Total
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembina (IV/a)	1	-	-	-	-	-	1
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	3	-	-	-	-	3
5.	Penata (III/c)	1	2	-	-	-	-	3
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)			1	-	-	-	1
7.	Penata Muda (III/a)	-	5		-	-	-	5
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-		2	-	-	2
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

c. Spesifikasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-
3.	Pembina (IV/a)	1	-	1
4.	Penata Tk.I (III/d)	2	1	3
5.	Penata (III/c)	1	2	3
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)		1	1
7.	Penata Muda (III/a)	3	2	5
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	2	-	2

9.	Pengatur (II/c)	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>

Selain sumber daya manusia dari Aparat Sipil Negara ( ASN ), dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan BPBD Kota Pontianak dibantu oleh relawan peduli bencana yang terlatih sebanyak 20 orang.

## **B. Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan fungsinya BPBD Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran dan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada saat ini meliputi :

### a. Gedung Kantor

Sejak Januari 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menempati bangunan di Jl. Letjen Sutoyo No. 71 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan.

### b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- 1) Mobil operasional Kepala Pelaksana jenis mini bus APV tahun 2007 sejumlah 1 unit dalam kondisi baik;
- 2) Mobil operasional lapangan (mobil komando) Ranger, jenis pickup double cabin tahun 2007, dalam kondisi baik;
- 3) Mobil operasional lapangan (mobil patroli) jenis pick up tahun 2021, dalam kondisi baik;
- 4) Sepeda motor operasional sekretariat sejumlah 2 unit dalam kondisi baik
- 5) Sepeda motor operasional lapangan jenis trail sejumlah 2 unit dalam kondisi baik.

### c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin APBD Kota Pontianak

### d. Peralatan Penanggulangan Bencana

BPBD Kota Pontianak memiliki beberapa peralatan penanggulangan bencana, seperti peralatan pemadaman karhutla, peralatan pertolongan di air, tenda, dll

BPBD Kota Pontianak masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana seperti gudang untuk penyimpanan peralatan, mobil pick up untuk operasional

penanggulangan bencana, serta peralatan penanggulangan bencana.

### **C. Sumber Daya Keuangan**

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Untuk tahun 2022, jumlah anggarannya adalah Rp. 4.868.411.371,- (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Seibelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) terdiri dari :

- Belanja Pegawai = Rp. 2.866.999.610,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rabu Enam Ratus Sepuluh)
- Belanja Barang dan Jasa = Rp.1.882.646.988,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
- Belanja Modal = Rp. 118.764.773,- (Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah. Untuk menilai kinerja BPBD Kota Pontianak dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja dan melalui Akuntabilitas Keuangan pada tahun sebelumnya.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Pengukuran Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2022**

<b>Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022</b>					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,45*	81,82%

*Sumber : Hasil koordinasi dengan BNPB*

Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator Indeks Kapasitas Daerah.

Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah 0,45. Pada tahun 2022 realisasi IKD Kota Pontianak masih berada di angka 0,45, atau tidak berubah dari IKD tahun sebelumnya. Dengan kata lain Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2022 sebesar 0,45

lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yakni sebesar 0,55, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah **“Berhasil”**, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **81,82%**.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan rincian kegiatan :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

– Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

– Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

– Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

– Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

– Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

– Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

– Penyusunan Rencana Kontijensi

– Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

– Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

– Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota

– Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota

– Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

– Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota

Sementara itu, analisis penyebab penurunan capaian kinerja dijelaskan pada tabel dibawah ini.



Tabel II.2

**Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja  
Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan  
di Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kapasitas Daerah	tetap	Pemulihan dari berbagai sektor pasca dilanda pandemi covid-19, termasuk dalam pelayanan di bidang penanggulangan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ berusaha menambah pagu anggaran di tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan yang ada kaitannya dengan indikator capaian SPM;</li> <li>➤ meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana, terutama untuk mendapatkan data dukung untuk meningkatkan nilai IKD;</li> <li>➤ melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di pusat dan daerah, melalui koordinasi langsung ke BNPB.</li> <li>➤ melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik.</li> <li>➤ perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana.</li> <li>➤ menyiapkan / merevisi dokumen - dokumen terkait pengelolaan, perencanaan dan pencegahan dibidang kebencanaan yang telah habis masa berlakunya.</li> <li>➤ untuk dapat melaksanakan berbagai upaya perbaikan/ solusi diatas, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi serta memahami tugas dan fungsinya sangat diperlukan, mengingat ketersediaan SDM di BPBD Kota Pontianak dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat kurang.</li> </ul>

*Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2022*

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja BPBD Kota Pontianak dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah tidak mengalami kenaikan (tetap). Adapun faktor penyebab tetapnya Indeks Kapasitas Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, yang menyebabkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, dialihkan untuk

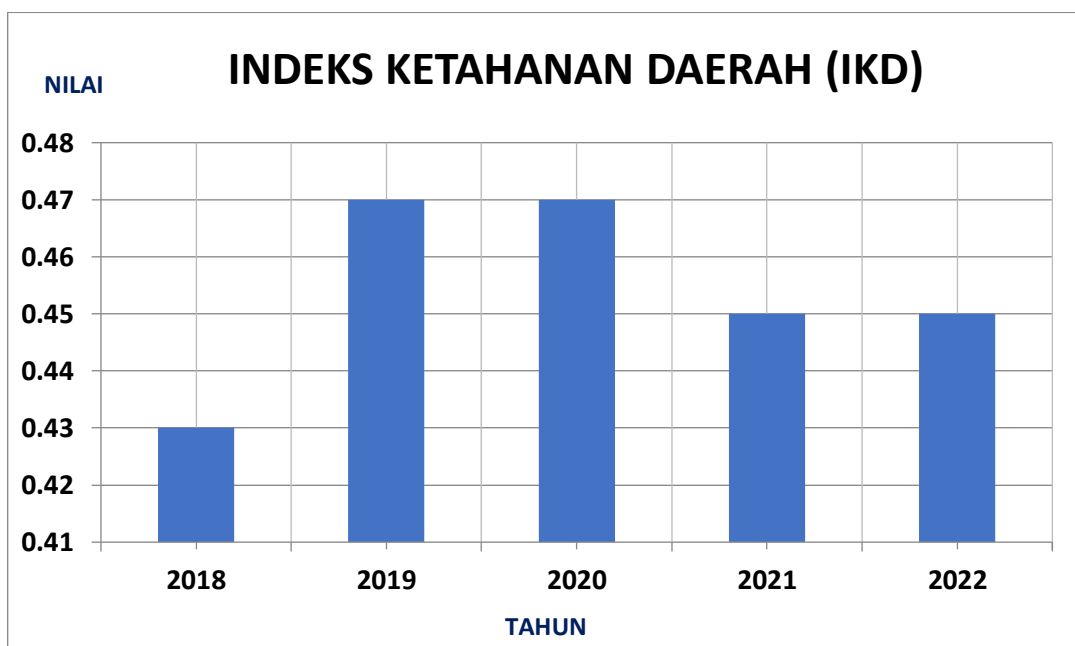
pencegahan penularan covid-19 di wilayah Kota Pontianak, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau ditangguhkan ditahun berikutnya, dan untuk tahun 2022 sendiri pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Pontianak fokus melakukan upaya pemulihan dari berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pelayanan di bidang penanggulangan bencana;

- Kurangnya koordinasi baik internal maupun eksternal antara instansi pengampu indikator IKD terkait pencapaian nilai IKD, dimana banyak data dukung yang belum / tidak berhasil didapatkan;

Adapun nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar II.2**

**Nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2018 - 2022**



*Sumber : Buku IRBI 2022*

- Dari grafik di atas terlihat bahwa angka Indeks Kapasitas Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, yakni dari 0,43 di tahun 2018 meningkat menjadi 0,47 ditahun 2019. Dari tahun 2019 ke 2020 tidak terdapat kenaikan yakni tetap di angka 0,47. Untuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak mengalami penurunan di angka 0,45 dari tahun 2020, dengan penurunan sebesar 0,02. Untuk tahun 2022 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak tidak mengalami kenaikan (tetap) dari tahun 2021 yakni sebesar 0,45 atau dengan kata lain tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 0,55, sehingga capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 81,82%, lebih rendah 18,18 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Tidak tercapainya nilai IKD Kota Pontianak sebesar 0,55 tersebut

disebabkan karena Sejak tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, yang menyebabkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, dialihkan untuk pencegahan penularan covid-19 di wilayah Kota Pontianak, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau ditangguhkan ditahun berikutnya, dan untuk tahun 2022 sendiri pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Pontianak fokus melakukan upaya pemulihan dari berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pelayanan di bidang penanggulangan bencana;

Sementara itu, capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL II.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pontianak**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Presentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi					100%	100%				100%	100%	-	-		1	1	-	-
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			√		100%	-				0%	-				0	-		
	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal			√		-	-				-	-				-	-		
	Presentase warga negara yang ikut pelatihan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			√		100%	100%				100%	0%				1	0		
	Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			√		100%	100%				100%	0%				1	0		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk					1 Kelurahan	5 Kelurahan				1 Kelurahan	5 Kelurahan				1	1		
	Jumlah sekolah tangga bencana yang terbentuk					1 Sekolah	1 Sekolah				1 Sekolah	1 Sekolah				1	1		
	Presentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			√		100%	100%				100%	100%							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase jkecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik					100%	100%				100%	100%				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase SOP yang dibuat					100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah SOP yang dibuat					2 SOP	2 SOP				2 SOP	2 SOP				1	1		
	Presentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan					100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah					25 dokumen/laporan	25 dokumen/laporan				25 dokumen/laporan	25 dokumen/laporan				1	1		



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan				9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan				1	1		
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah					7 dokumen/laporan	7 dokumen/laporan				7 dokumen/laporan	7 dokumen/laporan				1	1		
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun					9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan				9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan				1	1		
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya					21 orang	18 orang				21 orang	20 orang				1	1		
	Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya					46 Stell	38 Stell				46 Stell	38 Stell				1	1		
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal					2 orang	4 orang				2 orang	3 orang				1	1		
	Jangka waktu Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					13 unit	12 unit				13 unit	12 unit				1	1		
	Jangka waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jangka waktu waktu penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				1	1		
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara					48 unit	48 unit				48 unit	60 unit				1	1		
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					39 unit	37 unit				39 unit	37 unit				1	1		
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara					7 unit	9 unit				7 unit	9 unit				1	1		
	Jumlah gedung kantor dan bangun lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	1 unit				1 unit	1 unit				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					-	1 unit					-	1 unit				-	1			

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak, alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

### **Alokasi Anggaran Tahun 2022**

#### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp. -</b>
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Rp. 4.868.411.371,-</b>
	<b>a. Belanja Pegawai</b>	<b>Rp. 2.866.999.610,-</b>
	<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 1.882.646.988,-</b>
	<b>c. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 118.764.773,-</b>

Tahun Anggaran 2022 dari total belanja daerah Rp. 4.868.411.371,- terealisasi sebesar Rp. 4.345.035.307 ,- atau 89,25% yang dilaksanakan melalui 2 (dua) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Dari dana tersebut dijabarkan kedalam program umum dan pembangunan, dengan rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

**TABEL II.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		655.833.203	998.069.000	898.537.900	-		558.105.776	875.355.350	-			0,851	0,877	-	-	21,11	56,84
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		24.244.825	44.329.800	217.993.700			22.450.000	44.185.000	-			0,926	0,997			237,30	96,82
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		0	0	206.930.900			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		24.244.825	44.329.800	11.062.800			22.450.000	44.185.000	-			0,926	0,997			3,90	96,82
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		98.910.428	216.878.100	11.062.800			22.450.000	237.458.200	-			0,227	1,095			12,18	957,72
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		0	0	2.750.000			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		0	59.102.300	20.082.800			0	57.055.000	-			0,000	0,965			-66,02	0,00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		24.357.550	82.953.450	50.185.000			24.352.032	74.096.000	-			1,000	0,893			100,53	204,27

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	19.800.000	21.690.000			0	13.841.800	-			0,000	0,699			0,00	0,00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		40.909.700	56.486.500	13.262.800			40.909.700	53.411.200	-			1,000	0,946			-19,22	30,56
	Penyusunan Rencana Kontijensi		16.618.392	11.470.650	8.112.800			14.027.672	11.344.200	-			0,844	0,989			-30,12	-19,13
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		17.024.786	32.065.200	19.362.800			15.302.572	27.710.000	-			0,899	0,864			24,36	81,08
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		532.677.950	691.861.100	542.588.000			441.063.800	593.712.150	-			0,828	0,858			4,15	34,61
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		0	0	0			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		189.648.200	236.880.200	237.246.000			154.646.000	223.590.000	-			0,815	0,944			12,53	44,58
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		269.108.000	270.430.000	171.946.000			216.633.000	225.290.000	-			0,805	0,833			-17,96	4,00



No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		73.921.750	144.832.150	130.926.000			69.784.800	144.832.152	-			0,944	1,000			43,16	107,54
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	0	2.470.000			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	0	2.530.000			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana		0	0	2.530.000			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		3.294.672.554	3.867.808.371	5.053.014.930			3.133.935.929	3.469.679.957	-			0,951	0,897			24,02	10,71
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.675.023	34.204.700	39.148.200			11.215.191	27.039.800	-			0,961	0,791			103,71	141,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.649.823	7.750.100	7.574.900			4.572.563	6.796.800	-			0,983	0,877			32,21	48,64

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.490.300	20.819.900	26.114.000			3.272.468	17.693.500	-			0,938	0,850			260,97	440,68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.534.900	5.634.700	5.459.300			3.370.160	2.549.500	-			0,953	0,452			28,14	-24,35
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.707.633.501	2.727.938.730	4.249.321.774			2.570.038.573	2.525.589.217	-			0,949	0,926			28,26	-1,73
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		2.704.633.501	2.724.938.730	4.099.743.774			2.567.250.348	2.525.589.217	-			0,949	0,927			25,60	-1,62
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3.604.820	3.603.120	3.778.000			2.788.225	1.500.000	-			0,773	0,416			2,40	-46,20
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0	145.800.000			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		28.507.300	78.169.000	34.646.600			28.507.300	28.507.300	-			1,000	0,365			59,26	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		28.507.300	24.210.000	13.090.000			28.507.300	23.910.000	-			1,000	0,988			-30,50	-16,13

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0	53.959.000	21.556.608			0	19.794.800	-			0,000	0,367			0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		87.743.957	410.361.146	410.260.075			87.427.301	283.728.301	-			0,996	0,691			183,83	224,53
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		3.179.947	3.439.758	4.679.125			3.146.736	3.264.429	-			0,990	0,949			22,10	3,74
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		39.085.342	99.151.423	88.852.650			38.928.315	98.249.542	-			0,996	0,991			71,65	152,39
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17.700.000	26.850.000	19.250.000			17.675.000	26.450.000	-			0,999	0,985			11,69	49,65
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		18.768.668	29.780.938	28.972.300			18.667.250	29.742.306	-			0,995	0,999			27,98	59,33
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		4.000.000	5.000.000	5.000.000			4.000.000	5.000.000	-			1,000	1,000			12,50	25,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.010.000	246.139.000	64.900.000			5.010.000	121.022.024	-			1,000	0,492			2369,66	2315,61

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	64.900.000			0	0	-			0,000	0,000			0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		295.100.490	304.910.091	146.137.073			278.370.344	288.934.057	-			0,943	0,948			-24,37	3,79
	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		69.830.816	76.223.091	67.508.000			54.415.047	60.338.807	-			0,779	0,792			-1,14	10,89
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		225.269.674	228.687.000	78.628.000			223.955.297	228.595.250	-			0,994	1,000			-32,05	2,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.012.283	312.224.704	173.501.200			158.377.220	300.683.782	-			0,966	0,963			22,97	89,85

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		115.228.283	166.800.204	123.460.000			114.102.420	161.730.950	-			0,990	0,970			9,39	41,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		48.784.000	115.650.000	40.840.000			44.274.800	109.464.142	-			0,908	0,947			36,19	147,24
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	9.849.000	0			0	9.563.190	-			0,000	0,971			0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	19.925.500	0			0	19.925.500	-			0,000	1,000			0,00	0,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.867.808.371,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.469.679.957,- atau 89, 71%. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

### **1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 34.204.700,- dan terealisasi sebesar Rp.27.039.800,- atau 79,05%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

#### **1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun yaitu sebanyak 9 (sembilan) dokumen perencanaan, meliputi dokumen Renstra, Rencana Kerja (Renja), Renja Perubahan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), RKA serta RKA Perubahan.

#### **1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sebanyak 7 (tujuh) dokumen evaluasi meliputi dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi (RB), Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB), Profil OPD, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 1 dan 2, Evaluasi RB dan Evaluasi SAKIP.

#### **1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar**

##### **Realisasi Kinerja SKPD**

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun sebanyak 9 dokumen laporan capaian kinerja yang meliputi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan Evaluasi Renja yang dilaporkan setiap

triwulan.

## **2. Administasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.727.938.730,- dan terealisasi sebesar Rp.2.525.589.217,- atau 92,58%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

### **2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

### **2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD dengan target selama 12 bulan. Hasil dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK.

## **3. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 78.169.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43,- atau 79,05%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

### **3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Keluaran subkegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya. Pengadaan tersebut berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian dinas Lapangan (PDL) sebanyak 36 stell (masing-masing pegawai 2 stell), dan pakaian petugas kebersihan sebanyak 2 stell. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk keseragaman aparatur dalam berpakaian sehingga berdampak pada peningkatan disiplin dan semangat kerja aparatur.

### **3.2 Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Keluaran sub kegiatan ini adalah adanya diklat/bimtek/workshop/kursus dan lain-lain demi terpenuhinya peningkatan kualitas SDM BPBD Kota Pontianak. Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 36,68 %, dikarenakan anggaran diklat yang awalnya disiapkan untuk mengikuti diklat kebencanaan, hingga berakhirnya tahun 2022 diklat yang dimaksud tidak bisa diikuti dikarenakan tidak adanya undangan dari Pusdiklat BNPB.

## **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 410.361.146,- dan terealisasi sebesar Rp.

283.728.301,- atau 79,05%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa Filling Cabinet 1 unit, PC 1 unit, Laptop 2 unit dan Printer 1 unit. Selain itu sub kegiatan ini juga mengakomodir belanja alat tulis kantor yang rutin selama 1 tahun.

4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan barang cetakan selama 12 bulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan untuk dokumen-dokumen kantor.

4.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terciptanya penerangan kantor yang memadai.

4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Keluaran kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan untuk penyediaan jasa langganan media massa dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

4.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyediaan makanan dan minuman untuk tujuan rapat, tamu dan penambah daya tahan tubuh dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

4.6 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 304.910.091,- dan terealisasi sebesar Rp. 288.934.057,- atau 94,75%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan njasa layanan



internet, telepon, air dan listrik selama 12 bulan.

#### 5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran sub kegiatan ini adalah jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar belanja jasa cleaning service dan pembelian alat/bahan kebersihan kantor dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

### **6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 312.224.704,- dan terealisasi sebesar Rp. 288.934.057,- atau 94,75%. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

#### 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara. Pemeliharaan kendaraan pejabat eselon II sebanyak 1 unit, kendaraan roda dua sebanyak 4 unit, kendaraan patroli sebanyak 2 unit dan speedboat sebanyak 2 unit.

#### 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Peralatan mesin yang dimaksud adalah peralatan kantor berupa laptop sebanyak 7 unit, printer sebanyak 16 unit dan AC sebanyak 12 unit.

#### 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Pemeliharaan gedung kantor dilakukan untuk mengganti lantai/keramik yang pecah, pengecatan kembali, perbaikan pintu-pintu yang rusak, dan lain-lain.

#### 6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sasaran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Pemeliharaan dilakukan terhadap instalasi listrik bangunan kantor yang rusak.

Adapun alokasi anggaran untuk PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 998.069.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 875.355.350,- atau 87,70%. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan (sembilan belas) sub kegiatan dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

#### **7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.329.800,- dan telah terealisasi sebesar 44.185.000 atau 99,67%.

##### **7.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota**

Keluaran dari sub kegiatan ini persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal. Kegiatan ini telah dianggarkan pada Renja Murni tahun 2021 namun dilakukan refocusing karena anggaran yang dipusatkan untuk penanganan COVID-19 sehingga baru pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada Renja tahun 2023.

##### **7.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

Keluaran sub kegiatan ini adalah persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana. Bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini adalah disediakan sarana informasi peringatan dini kebakaran lahan. Sarana informasi yang dimaksud berupa pemasangan papan peringatan dini, brosur/famplet maupun spanduk di beberapa wilayah yang rawan kebakaran lahan, adanya sosialisasi tatap muka untuk masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.

#### **8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.878.100,- dan telah terealisasi sebesar 237.458.200 atau 90,68%.

##### **8.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**

Keluaran dari sub kegiatan ini persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal. Kegiatan ini baru dianggarkan pada Renstra ini untuk tahun 2024.

##### **8.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**

Keluaran sub kegiatan ini adalah persentase warga negara yang ikut

pelatihan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi terhadap bencana tertentu sesuai dengan lokasi dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana tersebut.

#### 8.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Keluaran dari sub kegiatan ini persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Kegiatan ini berpusat pada adanya pusdalops BPBD Kota Pontianak sebagai pusat data dan operasi dan menyediakan sarana prasarana untuk keberlangsungan pusdalops penanggulangan bencana.

#### 8.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Keluaran sub kegiatan ini adalah persentase warga yang mendapat peralatan perlindungan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembelian alat-alat yang diperlukan untuk penanggulangan bencana kebakaran, misalnya selang dan sambungannya, handy talky, dan masker baik yang digunakan untuk petugas maupun yang akan diberikan kepada masyarakat.

#### 8.5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kelurahan tangguh bencana dan sekolah tangguh bencana yang terbentuk. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah-daerah rawan bencana agar masyarakatnya mampu dan tangguh terhadap bencana sebagai langkah antisipasi dan mitigasi dampak dari bencana yang mungkin akan ditimbulkan. Dalam pelaksanaannya akan dibentuk forum tangguh bencana pada kelurahan terkait dan di berikan pengenalan berupa pelatihan-pelatihan maupun rapat-rapat yang dilakukan secara kontinyu agar kawasan tersebut benar-benar tangguh terhadap bencana. Pada 2022 telah terbentuk 1 kelurahan.

#### 8.6 Penyusunan Rencana Kontijensi

Keluaran dari sub kegiatan ini persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal. Dokumen renkon akan dijadikan sebagai pedoman yang digunakan pada saat suatu bencana terjadi. Dokumen renkon disusun secara rinci sampai dengan siapa saja pihak-pihak yang terlibat, tindakan apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana, apa saja yang dibutuhkan hingga berapa biaya yang diperlukan. Sampai dengan tahun 2022 telah terdapat dokumen Renkon Karhutla,

Renkon Banjir dan Renkon Puting Beliung.

#### 8.7 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Keluaran sub kegiatan ini persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan. Gladi Kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai bentuk lanjutan atau simulasi uji dokumen Renkon yang telah disusun bersama para stakeholder.

**Gambar II.3**

#### **Contoh Beberapa Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**



### **9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.691.861.100,- dan terealisasi sebesar Rp.593.712.150,- atau 85,81%. Jumlah Kejadian Bencana yang telah terjadi di Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebanyak 20 kejadian bencana, dimana 7 kejadian adalah bencana Karhutla dan 13 kejadian adalah bencana puting beliung (cuaca ekstrem) dengan jumlah korban terdampak sebanyak 325 jiwa, dan 75 buah rumah mengalami kerusakan. Dari total 20

#### 9.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana. Agar respon cepat terhadap bencana dapat di lakukan maka kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan piket dan patroli untuk mengantisipasi kejadian bencana yang mungkin terjadi. Kegiatan ini dilakukan oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) yang merupakan ASN aktif BPBD Kota Pontianak bersama dengan Relawan PB. Khusus untuk mengantisipasi karhulta BPBD Kota Pontianak membentuk tim koordinasi dengan petugas Babinsa dan Babinkamtibmas di keluarahan-kelurahan yang rawan

terjadi karhutla, TNI/POLRI dan damkar swasta untuk melakukan piket dan patroli mandiri di wilayahnya.

9.2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  
Keluaran dari sub kegiatan ini adalah persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini diperuntukan untuk operasi tanggap darurat bencana baik karhutla, banjir, puting beliung maupun pencarian orang hilang. Selain itu kegiatan ini juga memfasilitasi pemberian bantuan transportasi dan akomodasi kepada Tim Relawan yang ikut serta dalam penanganan tanggap darurat bencana.

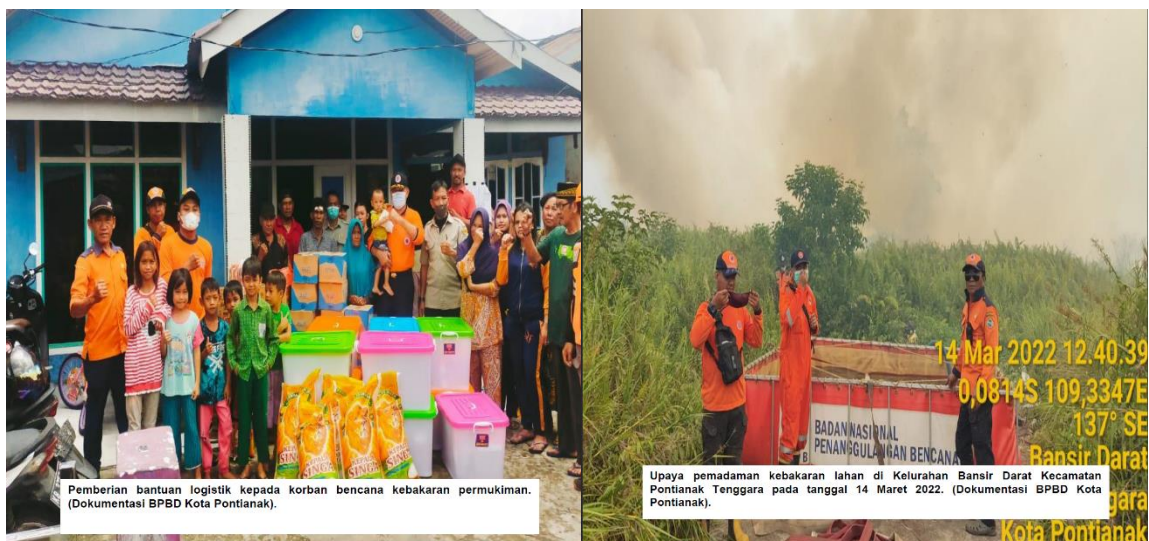
9.3 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Keluaran sub kegiatan ini adalah persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan dasar. Dengan bantuan yang diberikan berupa kebutuhan dasar (makanan siap saji) selama 3 hari, bantuan logistik, bantuan sandang, perlengkapan bayi dan lain sebagainya, yang bersumber dari dana APBD maupun dari BNPB berupa *buffer stock* yang selalu tersedia di gudang BPBD Kota Pontianak.

9.4 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana. Pengaktifan posko komando tanggap darurat bencana dapat dilakukan pada saat SK Status Tanggap Darurat ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketika Status Tanggap Darurat telah ditetapkan, maka jumlah biaya yang ditimbulkan dari penanggulangan tanggap darurat tersebut akan dibebankan pada kegiatan ini.

**Gambar II.4**  
**Contoh Beberapa Kegiatan Tanggap Darurat**



## **10. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.530.000,- namun tidak teralisasi dikarenakan pengalihan/refocusing anggaran sehingga capaian kinerjanya 0%.

### **10.1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana**

Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya regulasi penanggulangan bencana baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan walikota maupun kebijakan daerah lainnya serta SOP penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kota Pontianak.

## **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

BPBD Kota Pontianak melakukan pelayanan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yakni Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Semua masyarakat Kota Pontianak berhak mendapatkan layanan. Untuk Pelayanan Pra Bencana, BPBD Kota Pontianak mengkhususkan pada daerah-daerah yang rawan bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana. Untuk tahapan Tanggap Darurat Bencana, fokus layanan diberikan pada mereka yang mengalami musibah bencana melalui pemberian makanan siap saji dan bantuan logistik, kegiatan respon cepat bencana, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sedangkan pada tahapan Pasca Bencana, penerima layanan difokuskan pada korban bencana yang mengalami kerusakan fisik bangunan hingga kerusakan sarana prasarana lainnya.

Dalam melakukan upaya penanggulangan bencana, BPBD Kota Pontianak banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik dari sesama instansi pemerintahan dibawah naungan Pemerintah Kota Pontianak sendiri maupun dari pihak luar, seperti TNI, POLRI, Manggala Agni, Basarnas, PMI, Pemadam Kebakaran Swasta yang bernaung di bawah Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta, juga dari lembaga sosial seperti Rumah Zakat. Saat berada di lokasi bencana, semua mitra saling bekerjasama bahu membahu mulai dari upaya penanggulangan bencana seperti pemadaman lahan yang terbakar, pencarian/evakuasi korban, maupun dari segi sosial seperti pemberian bantuan sosial pasca terjadinya bencana.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan Pelayanan

Penjabaran permasalahan pelayanan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi dan capaian kinerja BPBD Kota Pontianak pada Bab II Renstra ini. Keseluruhan program kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% namun seperti yang telah dijelaskan pada bab II, target sasaran OPD yang telah ditetapkan pada beberapa tahun terakhir tidak dapat dicapai.

Nilai Indeks Kapasitas Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, yakni dari 0,43 di tahun 2018 meningkat menjadi 0,47 ditahun 2019. Dari tahun 2019 ke 2020 tidak terdapat kenaikan yakni tetap di angka 0,47. Un90 tuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak mengalami penurunan di angka 0,45 dari tahun 2020, dengan penurunan sebesar 0,02. Untuk tahun 2022 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak tidak mengalami kenaikan (tetap) dari tahun 2021 yakni sebesar 0,45 atau dengan kata lain tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 0,55, sehingga target IKD pada tahun 2022 tidak dapat dicapai 100%.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.1**

#### Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum tercapainya Indeks Ketahanan Daerah sesuai target yang telah ditetapkan	Terbatasnya sumber daya penanggulangan bencana BPBD Kota Pontianak, membuat upaya penanggulangan bencana kurang maksimal	Belum memadainya dukungan anggaran penanggulangan bencana
		Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang	Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
		Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap upaya penanggulangan bencana masih kurang	

### 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan keputusan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan. Sebagai respon terhadap dinamik lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Pontianak, dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 3 (tiga) tahun ke depan. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis BPBD Kota Pontianak yang dicanangkan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan adalah : **“Meningkatnya Penanggulangan Bencana”**, dengan indikator sasarannya : **“Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD”**. Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Pontianak pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

#### 1) Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kondisi wilayah Kota Pontianak yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, Kota Pontianak masuk dalam kategori sedang, dengan Indeks Risiko Bencana sebesar 90,63 dan nilai Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,45 dengan kategori sedang.

#### 2) Pengurangan Risiko Bencana Melalui Integrasi dalam Setiap Dimensi Pembangunan

Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan, Upaya-upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Upaya pengurangan risiko bencana di Kota Pontianak dilakukan dengan pendekatan struktural berupa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pendekatan non struktural berupa peningkatan budaya sadar bencana masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat).

#### 4) Perbaikan atau Restorasi Lahan Gambut

Diperlukan upaya perbaikan atau restorasi lahan gambut dan pengawasan yang ketat penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak terutama di wilayah sepadan sungai dan paret serta di lahan gambut, untuk mengurangi kejadian bencana di wilayah tersebut.



#### 5) Pemanfaatan Teknologi/Sistem Pendeteksi Bencana

Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkatkan respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuan system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Saat ini Indonesia hanya memiliki sistem deteksi tsunami;

#### 6) Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana.

Hhal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi. Masih perlu upaya terus menerus mengembangkan dan meningkatkan Kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat, kelompok masyarakat dan masyarakat dalam kemampuan ketangguhan menghadapi bencana.

#### 7) Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana.

Sejak tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) selaku instansi induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengakomodir isu pengarusutamaan gender, dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. Melalui Perka tersebut, diatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsif gender perlu dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi. Untuk itu, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap tahapan penanggulangan bencana perlu diterapkan, termasuk pada BPBD Kota Pontianak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Tujuan Perangkat Daerah akan terwujud di tahun 2026. Tujuan Perangkat Daerah menggambarkan arah strategis organisasi, sehingga semua program dan kegiatan di Perangkat Daerah difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026, BPBD Kota Pontianak mengampu Tujuan ke-2 Kota Pontianak yakni **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib**. Untuk mencapai tujuan Kota tersebut BPBD mendukung sasaran ke-4 yaitu **Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota** yang dapat diukur dengan indikator **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** dengan target yang ditetapkan meningkat dari 0,45 pada akhir tahun 2022 menjadi 0,60 di akhir tahun capaian Rensta tahun 2026 dengan kategori sedang.

Tujuan Perangkat Daerah ini dimaksudkan bahwa Masyarakat Kota Pontianak memiliki rasa aman terhadap ancaman bencana yang ada. Ancaman bencana dapat dikurangi atau dicegah, Pemerintah dan Masyarakat Kota Pontianak memiliki kapasitas ketangguhan menghadapi bencana sehingga kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana dapat diminimalkan.

Sementara sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat di capai, dan dalam frame waktu pencapaian. Sasaran merupakan gambaran tujuan Perangkat Daerah yang akan diwujudkan.

Berdasarkan Tujuan BPBD Kota Pontianak dan Indikator Kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026, Maka Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah : **“Meningkatnya penanggulangan bencana”**

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran yaitu : **“Persentase Pemenuhan 34 indikator IKD”**. Diharapkan Kota Pontianak dapat meningkatkan ketangguhan kota dengan mendongkrak nilai IKD Kota dengan memenuhi 34 dari 71 Indikator IKD yang menjadi wewenang BPBD Kota Pontianak.

**Tabel IV.1**

**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota		Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,50	0,55	0,60
		Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	44,12%	52,21%	69,12%

**4.2 Cascading**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment). dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis (pada tataran organisasi). Cascading dilakukan terhadap rencana Kinerja Atasan pada tataran pegawai, dan dilengkapi dengan IKI. Penjabaran kinerja dari atas ke bawah (cascading top-down) mengidentifikasi indikator kinerja untuk individu mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi dan diturunkan secara berjenjang ke unit kerja di bawahnya sampai pada jajaran pegawai.

Cascading yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab pejabat di BPBD Kota Pontianak dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2**  
**Cascading Kinerja Badan Penanggulangan BPBD Kota Pontianak**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1			4			7			10			
1 Meningkatkan Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Meningkatnya penanggulangan bencana	Presentase pemenuhan 34 indikator IKD	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat	Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana  Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana per jenis ancaman bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya data/informasi tentang jenis risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah / legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
						2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana			
						2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk dokumen yang sah / legal

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
									2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kawasan tangguh bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas TRC melalui pelaksanaan diklat/bimtek	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									7. Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab		
									8.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya aparatur dan warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana	
						3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana alam dan non alam yang ditanggulangi	1.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat KLB kurang dari 24 jam	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana	
									3.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana	
									4.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya makanan siap saji dan logistik bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
									5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
						4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen kebencanaan	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									2. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalinnnya kerja sama dan kemitraan antar lembaga dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya data dan informasi terkait kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
									5. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya data/informasi terkait pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU)	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	
										bencana dalam bentuk dokumen yang sah / legal	PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		
			2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat
									2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sekretariat
									3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepala Sekretariat
									6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya operasional administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab		
									2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepala Sekretariat	
									3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya pembayaran honor dan pengelola keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepala Sekretariat	
						7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas ASN beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kepala Sekretariat
									2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kompetensi ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Sekretariat	
						8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kepala Sekretariat
									2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kepala Sekretariat	
									3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kepala Sekretariat	

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
									n Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan	
									4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya sarana penyedia informasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediaka	Kepala Sekretariat
									5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tepenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, dan kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kepala Sekretariat
									6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sekretariat
									7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintah berbasis elektronik dengan baik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kepala Sekretariat
						9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran langganan internet, telepon, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kepala Sekretariat
									2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kepala Sekretariat

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
						1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung dan mesin dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kepala Sekretariat
									2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas dan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kepala Sekretariat

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah BPBD Kota Pontianak yakni Meningkatkan Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota, dengan sasaran meningkatnya penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak mengambil strategi penanggulangan bencana yang sesuai dengan RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelas penentuan Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.I**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Pontianak**

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>	
Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	1	Melaksanakan Upaya Penanggulangan Bencana Sesuai Standar	1	Peningkatan Ketangguhan Kota Pontianak dalam penanggulangan Bencana untuk pembangunan berkelanjutan.

Tangguh bencana bermakna bahwa Kota Pontianak mampu menahan, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana berfokus pada pemenuhan indikator-indikator ketahanan daerah dengan cara menggalakkan konsep kolaborasi pentahelix yang berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi ini menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian-bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR). Salah satu yang perlu ditekankan adalah pengarustamaan kewaspadaan terhadap bencana dalam perencanaan dan pembangunan Kota Pontianak.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pontianak bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya Pengurangan Indeks Risiko Bencana Pontianak dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Pontianak sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD Kota Pontianak 2024 – 2026.

Untuk mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah BPBD Kota Pontianak yaitu mewujudkan Kota yang aman dan tertib, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indikator sasaran menurunnya indeks Kapasitas Daerah, maka BPBD Kota Pontianak menetapkan 1 Program Utama yang terdiri dari 3 Pelayanan Utama urusan kebencanaan. Penetapan program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050- 3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini telah dilakukan penyelarasan yang sesuai dokumen perencanaan lain. Selain itu telah dilakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan yang sesuai dengan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari PAN RB.

Adapun Program Utama tersebut adalah Program Penanggulangan Bencana dimana Program ini memiliki 4 Pelayanan Utama yakni :

#### **1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

Pelayanan Informasi Rawan Bencana dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah rawan bencana sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku budaya sadar bencana. Kegiatan ini memuat dua sub kegiatan yaitu penyusunan kajian resiko bencana dan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

## **2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana**

Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini bertujuan untuk melakukan upaya upaya pencegahan sehingga bencana dapat diminimalkan serta memberikan upaya kesiapsiagaan kepada masyarakat, sehingga pemerintah, lembaga masyarakat dan masyarakat memiliki kemampuan bersiap diri menghadapi ancaman bencana yang akan datang, sehingga korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan. Diharapkan peristiwa alam yang terjadi tidak menjadi bencana kemanusiaan.

## **3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dimaksudkan memberikan pelayanan penanganan tanggap darurat saat terjadi bencana sehingga kejadian bencana tidak meluas dan membesar. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pertolongan dan evakuasi kepada korban bencana yang memerlukan.

## **4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.**

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana bertujuan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana agar seluruh kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan, sasaran dan program (*Out Come*) dan Kegiatan (*Output*), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel VI.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan BPBD Kota Pontianak**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,50		0,55		0,60		0,60			
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana			Persentase Pemenuhan 34 indikator IKD	36,03%	44,12%		52,21%		69,12%		69,12%			
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana		100%	1.598.537.900	100%	1.406.007.900	100%	1.405.084.200	100%	4.409.630.000	Bidang Penanggulangan Bencana	KOTA PONTIANAK
				Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		100%		100%					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>		<b>100%</b>	<b>55.910.200</b>	<b>100%</b>	<b>65.910.200</b>	<b>100%</b>	<b>55.910.200</b>		<b>177.730.600</b>		
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		-	-	1 Dokumen	10.000.000	-	-	1 Dokumen	10.000.000		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman		250 Orang	55.910.200	250 Orang	55.910.200	250 Orang	55.910.200	750 orang	167.730.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya											
			<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>497.509.700</b>	<b>100%</b>	<b>297.509.700</b>	<b>100%</b>	<b>297.509.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.092.529.100</b>		
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		80 Orang	30.062.800	80 Orang	30.062.800	80 Orang	30.062.800	240 orang	90.188.400		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan		12 Dokumen	5.018.500	12 Dokumen	5.018.500	12 Dokumen	5.018.500	36 Dokumen	15.055.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		75 Unit	21.690.000	75 Unit	21.690.000	75 Unit	21.690.000	225 Unit	65.070.000		
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		5 Kawasan	63.262.800	5 Kawasan	63.262.800	5 Kawasan	63.262.800	15 kawasan	189.788.400		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		40 orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	120 orang	240.000.000		
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		1 Dokumen	58.112.800	1 Dokumen	58.112.800	1 Dokumen	58.112.800	3 Dokumen	174.338.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		200 Orang	39.362.800	200 Orang	39.362.800	200 Orang	39.362.800	600 Orang	118.088.400		
			<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase kejadian bencana alam dan non alam yang ditanggulangi</b>		<b>100%</b>	<b>919.548.000</b>	<b>100%</b>	<b>919.548.000</b>	<b>100%</b>	<b>926.094.300</b>	<b>100%</b>	2.765.190.300		
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	3 laporan	0		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dokumen	237.246.000	1 Dokumen	237.246.000	1 Dokumen	237.246.000	3 dokumen	711.738.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		200 Orang	548.906.000	200 Orang	548.906.000	200 Orang	548.906.000	600 orang	1.646.718.000		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		275 Orang	130.926.000	275 Orang	130.926.000	275 Orang	137.472.300	825 orang	399.324.300		
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		1 Laporan	2.470.000	1 Laporan	2.470.000	1 Laporan	2.470.000	3 laporan	7.410.000		
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	3 dokumen	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu											
			<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen kebencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>125.570.000</b>	<b>100%</b>	<b>123.040.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.570.000</b>	<b>100%</b>	<b>374.180.000</b>		
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen	2.530.000	-	-	1 Dokumen	2.530.000	2 dokumen	5.060.000		
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 Dokumen	84.540.000	1 Dokumen	84.540.000	1 Dokumen	84.540.000	3 dokumen	253.620.000		
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		1 Laporan	17.500.000	1 Laporan	17.500.000	1 Laporan	17.500.000	3 laporan	52.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	3 laporan	33.000.000		
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 dokumen	30.000.000		
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</b>	95%	95%	3.757.539.100	95%	3.781.169.100	95%	3.688.348.800	95%	11.227.057.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	39.148.200	100%	39.148.200	100%	39.148.200	100%	117.444.600		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	7.574.900	6 dokumen	7.574.900	6 dokumen	7.574.900	18 dokumen	22.724.700		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	5.459.300	4 laporan	5.459.300	4 laporan	5.459.300	12 dokumen	16.377.900		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	26.114.000	3 laporan	26.114.000	3 laporan	26.114.000	9 dokumen	78.342.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.908.155.000	100%	2.939.255.000	100%	2.845.511.000	100%	8.692.921.000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	19 orang/bulan	2.758.577.000	19 orang/bulan	2.789.677.000	19 orang/bulan	2.695.933.000	19 orang/bulan	8.244.187.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	3.778.000	1 laporan	3.778.000	1 laporan	3.778.000	3 laporan	11.334.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	145.800.000	12 dokumen	145.800.000	12 dokumen	145.800.000	36 dokumen	437.400.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	100%	100%	51.346.608	100%	51.346.608	100%	51.346.608	100%	154.039.824		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kepegawaian Perangkat Daerah											
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	29.790.000	1 paket	29.790.000	1 paket	29.790.000	1 paket	89.370.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen/ laporan	2 dokumen/ laporan	21.556.608	2 orang	21.556.608	2 orang	21.556.608	6 orang	64.669.824		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	412.711.019	100%	405.241.019	100%	406.164.719	100%	1.224.116.757		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	90.982.719	1 paket	83.512.719	1 paket	84.436.419	3 paket	258.931.857		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	19.250.000	1 paket	19.250.000	1 paket	19.250.000	1 paket	57.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	3 paket	15.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	36 dokumen	15.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	28.972.300	1 paket	28.972.300	1 paket	28.972.300	3 paket	86.916.900		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	198.606.000	1 laporan	198.606.000	1 laporan	198.606.000	3 laporan	595.818.000		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	64.900.000	12 Dokumen	64.900.000	12 Dokumen	64.900.000	36 dokumen	194.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	146.137.073	100%	146.137.073	100%	146.137.073	100%	438.411.219		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	67.508.673	12 laporan	67.508.673	12 laporan	67.508.673	36 laporan	202.526.019		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	78.628.400	12 laporan	78.628.400	12 laporan	78.628.400	36 laporan	235.885.200		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	200.041.200	100%	200.041.200	100%	200.041.200	100%	600.123.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2022)	Tahun Pelaksanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 ( 2024 )		Tahun-2 ( 2025 )		Tahun-3 ( 2026 )		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit 40.840.000	42 unit 40.840.000	42 unit 40.840.000	42 unit 40.840.000	42 unit 122.520.000					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit 150.000.000	9 unit 150.000.000	9 unit 150.000.000	9 unit 150.000.000	9 unit 340.840.000					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit 9.201.200	1 unit 9.201.200	1 unit 9.201.200	1 unit 9.201.200	1 unit 27.603.600					
			<b>JUMLAH</b>			<b>5.356.077.000</b>	<b>5.187.177.000</b>	<b>5.093.433.000</b>	<b>11.409.847.600</b>						

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN WAJIB PELANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN

Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BPBD Kota Pontianak telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kota Pontianak lima tahun mendatang dalam penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke 5 Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Pontianak sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 3, Maka Tujuan Utama BPBD adalah “**Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana**”, dengan Indikator Kinerja Utamanya : “**Indeks kapasitas Daerah**”. untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas maka BPBD Kota Pontianak menetapkan Sasaran Utama Perangkat Daerah yaitu: “**Meningkatkan Kawasan Tangguh Bencana**”, dengan Indikator Kinerja Utamanya : “**Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana**”.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Indikator Tujuan:					
	Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60
	Indikator Sasaran:					
	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	36,03%	44,12%	52,21%	69,12%	69,12%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Pontianak di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, sepenuhnya diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tercantum dalam RPD periode 2024–2026 dengan rincian yang terdiri dari, tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. Landasan penyusunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencapai tujuan pembangunan Pontianak bidang Penanggulangan Bencana bagi pejabat eselon II, III, staf dan seluruh mitra kerja BPBD Kota Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan, namun BPBD Kota Pontianak telah memiliki arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam hal penanggulangan bencana. Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

Demikian RENSTRA BPBD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis dan terarah sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**WALI KOTA PONTIANAK**

**EDI RUSDI KAMTONO**